ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

Modal Simbolik Purnawirawan dalam Pertahanan Nirmiliter Indonesia

Theresia Yan D[1], Novky Asmoro[2], Subur Wahono[3]
1,2,3Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Program Studi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan, Indonesia
E-mail: theresia.dwiaryati@mp.idu.ac.id

Article History:
Received: 09 Oktober 2026
Revised: 16 Oktober 2026
Accepted: 31 Oktober 2026

Keywords: *Modal Simbolik, Purnawirawan, Pertahanan Nirmiliter, Hubungan Sipil Militer, Veteran.*

Abstrak: *Penelitian ini menganalisis peran sosiopolitik purnawirawan dalam pertahanan nirmiliter simbolik. Indonesia melalui perspektif modal Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pengalaman militer, identitas korps, dan legitimasi historis dikonversikan menjadi kekuatan sosial melalui dua jalur berbeda, yaitu jalur institusional Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan jalur mobilisasi kolektif Forum Purnawirawan 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif. Data diperoleh melalui studi dokumen, literatur akademik, dan dokumen publik. Analisis menggunakan teori modal simbolik Pierre Bourdieu, hubungan sipil-militer Samuel Huntington, dan profesionalisme militer Morris Janowitz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa purnawirawan memiliki posisi strategis sebagai aktor sosial pasca militer. Kontribusi penelitian ini adalah menawarkan konsep dual pathway conversion of retired military symbolic capital dalam kajian pertahanan nirmiliter.*

1. PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan strategis global pada abad ke-21 telah mengubah paradigma keamanan nasional dan konseptualisasi pertahanan negara secara mendasar. Pertahanan modern tidak lagi dipahami sebatas pada kapasitas menghadapi agresi militer konvensional antar-negara, melainkan berkembang mencakup penanganan ancaman multidimensional yang bersifat hibrida dan nirmiliter (Farrell et al., 2018). Spektrum ancaman nirmiliter meliputi penetrasi ideologi radikal, disinformasi, instabilitas politik, konflik sosial berbasis identitas, krisis energi dan pangan, serta kejahatan siber yang berpotensi merusak sendi-sendi ketahanan nasional (Diamond, 2019; Ministry of Defense Republic of Indonesia, 2020).

Dalam doktrin Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, seluruh warga negara dan sumber daya nasional merupakan komponen pendukung dan komponen cadangan yang krusial untuk menopang ketahanan nasional (Republik Indonesia, 2002; Widodo & Simatupang, 2023). Kondisi ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok sosial tertentu yang

memiliki akumulasi modal sosial dan simbolik tinggi untuk mengambil peran aktif dalam dinamika pertahanan nirmiliter. Salah satu kelompok masyarakat yang memiliki karakteristik sosiopolitik unik dan pengaruh kuat dalam lanskap ketahanan di Indonesia adalah purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Purnawirawan memiliki perbedaan signifikan dibandingkan kelompok masyarakat sipil lainnya. Selama masa dinas aktif, mereka dibentuk melalui pendidikan militer yang ketat, doktrin jiwa korsa, pengalaman kepemimpinan hierarkis, serta keterlibatan langsung dalam menjaga kedaulatan negara (Janowitz, 1960; Booth et al., 2001). Setelah memasuki masa purnatugas, identitas militer tersebut tidak serta-merta hilang, melainkan mentransformasi diri menjadi modal simbolik yang diakui oleh masyarakat dan otoritas publik (Bourdieu, 1986; Keppy, 2024). Pengalaman organisasional, jaringan korps, dan kehormatan historis yang melekat pada purnawirawan menjadikan mereka aktor sosiopolitik yang sangat berpengaruh dalam mengartikulasikan nilai-nilai kebangsaan dan kesadaran bela negara (Rasyid & Nugroho, 2023).

Studi hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Reformasi 1998 umumnya terfokus pada konsolidasi demokrasi, penegakan supremasi sipil, dan pencabutan Dwifungsi ABRI dari ranah politik praktis (Mietzner, 2020; Haripin, 2020). Sebagian besar literatur mengkaji peran militer aktif dan dinamika kelembagaan dalam menjaga netralitas TNI (Aspinall et al., 2021; Feaver, 1999). Namun demikian, kajian yang secara khusus meneliti bagaimana purnawirawan —sebagai aktor pasca-dinas militer—mengonversikan modal simbolik mereka untuk memengaruhi ruang publik dan pertahanan nirmiliter masih relatif terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan akademis (academic gap) tersebut dengan mengkaji artikulasi modal simbolik purnawirawan melalui dua pola konversi yang berbeda: pertama, jalur institusional terstruktur melalui Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 (Republik Indonesia, 2012); dan kedua, jalur mobilisasi kolektif melalui jejaring sosial publik seperti Forum Purnawirawan 2025 (Hasan, 2022; Priamarizki & Haripin, 2026). Melalui pendekatan ini, penelitian ini merumuskan kerangka konseptual Dual Pathway Conversion of Retired Military Symbolic Capital dalam konteks pertahanan nirmiliter Indonesia.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Modal Simbolik Pierre Bourdieu

Konsep modal simbolik yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu (1986) menyediakan pisau analisis yang tajam untuk memahami bagaimana kehormatan, reputasi, dan pengakuan sosial bertransformasi menjadi sumber kekuasaan. Bourdieu mendefinisikan modal simbolik sebagai bentuk modal ekonomi, budaya, atau sosial yang telah memperoleh legitimatasi dan persepsi positif dari instrumen sosial di sekitarnya. Dalam kasus purnawirawan militer, modal simbolik dibentuk dari akumulasi masa dinas, riwayat operasi ketahanan, pangkat terakhir, serta simbol-simbol kehormatan negara (Keppy, 2024). Ketika purnawirawan bertindak di ruang publik, masyarakat cenderung mempersepsikan mereka sebagai figur patriotik, disiplin, dan memiliki komitmen tinggi terhadap integritas NKRI.

2.2 Hubungan Sipil-Militer dan Profesionalisme Militer

Teori klasik hubungan sipil-militer Samuel Huntington (1957) menekankan pentingnya pembagian batas yang jelas antara otoritas sipil dan profesionalisme militer (*objective civilian control*). Menurut Huntington, militer yang profesional berfokus pada keahlian manajemen kekerasan demi pertahanan negara dan tunduk pada kontrol politisi sipil yang sah. Sebaliknya, Morris Janowitz (1960) dalam karya monumentalnya *The Professional Soldier* menawarkan perspektif *constabulary force* yang menyoroti integrasi nilai-nilai militer dengan perubahan norma-norma sosial masyarakat secara dinamis.

Dalam konteks pasca-dinas, purnawirawan berada pada titik persimpangan antara identitas militer dan status sebagai warga negara sipil (Booth et al., 2001). Finer (2002) dan Perlmutter (2018) mengargumenkan bahwa purnawirawan tetap membawa disposisi politik dan kebiasaan kepemimpinan (*habitus*) militer ke dalam kehidupan sipil. Oleh karena itu, pola artikulasi purnawirawan memerlukan kerangka tata kelola demokratis (*democratic governance*) agar partisipasi mereka menopang ketahanan nasional tanpa mencederai prinsip kontrol sipil atas militer (Croissant et al., 2018; Kuehn, 2020; Schiff, 2009).

2.3 Pertahanan Nirmiliter dan Keamanan Nasional

Doktrin pertahanan Indonesia mengategorikan pertahanan negara menjadi pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter (Republik Indonesia, 2002). Pertahanan nirmiliter ditempatkan untuk menghadapi ancaman non-fisik yang berpotensi merusak kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa (Ministry of Defense Republic of Indonesia, 2020; Widodo & Simatupang, 2023). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan berbasis veteran dan purnawirawan, menjadi benteng utama dalam memperkuat kesadaran bela negara dan ketahanan ideologi (Rasyid & Nugroho, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus komparatif (*comparative case study*) (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali kedalaman makna serta dinamika konversi modal simbolik purnawirawan dalam konteks sosiopolitik yang kompleks. Desain studi kasus komparatif membandingkan dua unit analisis utama: (1) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) sebagai representasi organisasi veteran formal-institusional, dan (2) Forum Purnawirawan 2025 sebagai bentuk artikulasi kolektif-nonformal di ruang publik (Hasan, 2022; Priamarizki & Haripin, 2026).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*document study*) dan penelusuran literatur sekunder secara mendalam (Miles et al., 2014). Sumber data meliputi dokumen perundang-undangan (UU No. 3/2002, UU No. 15/2012), Buku Putih Pertahanan, dokumen resmi organisasi LVRI, publikasi media massa, serta artikel jurnal internasional dan nasional bereputasi terbitan tahun 2020–2026 (Aspinall et al., 2021; Keppy, 2024; Mietzner, 2020).

Analisis data menerapkan teknik analisis tematik berbasis langkah-langkah Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori dengan membenturkan temuan lapangan terhadap perspektif teoritis Bourdieu (1986), Huntington (1957), dan Janowitz (1960).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sumber-Sumber Modal Simbolik Purnawirawan TNI

Hasil analisis menunjukkan bahwa modal simbolik purnawirawan TNI bersumber dari tiga pilar utama: pengalaman keaktroan militer, identitas kelembagaan/korps, dan legitimasi histori-sosial. Pengalaman penugasan dalam menjaga batas wilayah dan operasi keamanan memberikan legitimasi keahlian yang diakui publik. Identitas korps yang terikat pada nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit memperkuat persepsi moralitas di masyarakat (Janowitz, 1960; Keppy, 2024). Akumulasi ketiga pilar ini dikonversikan menjadi sumber daya sosial yang efektif saat purnawirawan berinteraksi di ranah sipil.

4.2 Jalur Artikulasi Institusional: Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI)

Jalur pertama konversi modal simbolik berlangsung secara terstruktur melalui organ formal LVRI. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2012, LVRI memiliki status resmi sebagai wadah berhimpun para veteran dan purnawirawan yang diakui oleh negara (Republik Indonesia, 2012). Melalui jalur institusional ini, modal simbolik purnawirawan disalurkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pertahanan nirmiliter, khususnya dalam pembinaan kesadaran bela negara, sosialisasi nilai-nilai 1945, serta penguatan wawasan kebangsaan kepada generasi muda (Rasyid & Nugroho, 2023).

Jalur LVRI menunjukkan karakteristik konversi yang stabil, konstruktif, dan selaras dengan kebijakan pemerintah dalam memperkokoh ketahanan nasional (Widodo & Simatupang, 2023). Karena bergerak dalam koridor hukum dan regulasi negara, artikulasi modal simbolik LVRI relatif minim risiko memicu kontroversi politik partisan, sehingga memperkuat kohesi sosial masyarakat (Ministry of Defense Republic of Indonesia, 2020).

4.3 Jalur Mobilisasi Kolektif: Forum Purnawirawan 2025

- Jalur kedua ditunjukkan oleh kemunculan jejaring non-formal seperti Forum Purnawirawan 2025. Berbeda dengan LVRI yang bersifat hierarkis-organisatoris, Forum Purnawirawan 2025 memanfaatkan jejaring sosial informal, ikatan alumni almamater perwira, serta platform media publik untuk mengartikulasikan pandangan sosiopolitik (Hasan, 2022; Priamarizki & Haripin, 2026). Purnawirawan yang terlibat dalam forum ini mengonversikan kewibawaan simbolik mereka untuk memberikan kritik, masukan kebijakan, maupun pandangan kritis terkait isu-isu strategis bangsa, seperti tata kelola pemerintahan dan ketahanan nasional (Aspinall et al., 2021; Mietzner, 2020).
- Meskipun jalur ini mencerminkan dinamika partisipasi warga negara dalam masyarakat demokratis (Diamond, 2019; Finer, 2002), artikulasi modal simbolik di ruang publik yang highly-contested memerlukan kehati-hatian. Tanpa tata kelola yang bijak, pernyataan sikap politik purnawirawan berisiko dipersepsikan oleh publik sebagai bentuk 'kembalinya pengaruh militer' dalam politik sipil, yang dapat memicu ketegangan dalam kerangka hubungan sipil-militer (Haripin, 2020; Kuehn, 2020).

5. MODEL KONSEPTUAL

Berdasarkan temuan penelitian, dikembangkan model konseptual *Dual Pathway Conversion of Retired Military Symbolic Capital*. Model ini menggambarkan alur transformasi dari pengalaman militer masa lalu menjadi daya dukung pertahanan nirmiliter melalui dua arena yang berbeda:

Pengalaman Militer & Legitimasi Historis ➔ Pembentukan Modal Simbolik (Bourdieu, 1986) ➔ [Jalur 1: Institutional Pathway (LVRI)] atau [Jalur 2: Collective Mobilization Pathway (Forum 2025)] ➔ Kontribusi pada Pertahanan Nirmiliter & Ketahanan Nasional.

Tabel 1. Perbandingan Jalur Artikulasi Modal Simbolik Purnawirawan

Aspek	LVRI (Jalur Institusional)	Forum Purnawirawan 2025 (Jalur Kolektif)	Analisis Sintesis
Basis Legitimasi	Formal, regulasi UU No. 15/2012, serta sejarah perjuangan resmi.	Jejaring alumni perwira, reputasi personal, dan solidaritas korps.	Diferensiasi sumber modal simbolik formal vs kualitatif.
Arena Utama	Struktur organisasi resmi, instansi pemerintah, sekolah, dan komunitas.	Ruang publik, media massa, diskusi strategis, dan forum sipil.	Perbedaan ruang artikulasi antara arena tertutup dan terbuka.
Dampak Sosiopolitik	Memperkuat kohesi sosial, edukasi bela negara, dan ketahanan nasional.	Mengartikulasikan aspirasi politik dan kontrol sosial kritis.	Perlu keseimbangan agar tidak mengganggu kontrol sipil atas militer.

Sumber: Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2012, literatur akademik, dan dokumen publik Forum Purnawirawan 2025.

6. IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIS

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur hubungan sipil-militer (Huntington, 1957; Janowitz, 1960; Feaver, 1999) dengan memasukkan perspektif modal simbolik Bourdieu (1986). Penelitian ini membuktikan bahwa studi hubungan sipil-militer di negara berkembang tidak boleh berhenti pada analisis militer aktif, tetapi harus memperhitungkan kapasitas purnawirawan sebagai agen perubahan sosial yang memiliki *symbolic capital* tinggi.

Secara praktis, pemerintah dan Kementerian Pertahanan dapat memformulasikan regulasi serta wadah kolaborasi terstruktur untuk mengoptimalkan potensi purnawirawan dalam program pertahanan nirmiliter, seperti mitigasi krisis nasional, edukasi kebinekaan, serta literasi benteng ideologi bangsa (Ministry of Defense Republic of Indonesia, 2020; Rasyid & Nugroho, 2023).

7. SIMPULAN DAN SARAN

Purnawirawan TNI memiliki kedudukan strategis dalam sistem pertahanan nirmiliter Indonesia melalui artikulasi modal simbolik. Modal simbolik tersebut dikonversikan melalui dua jalur utama, yakni jalur institusional formal (LVRI) yang berorientasi pada stabilitas dan penguatan wawasan kebangsaan, serta jalur mobilisasi kolektif (Forum Purnawirawan 2025) yang berfokus pada artikulasi pandangan politik dan kontrol sosial di ruang publik.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi kuantitatif berbasis survei nasional untuk mengukur tingkat persepsi publik terhadap efektivitas modal simbolik purnawirawan, serta

melakukan studi komparatif internasional dengan negara-negara konsolidasi demokrasi lainnya di Asia Tenggara (Croissant et al., 2018; Kuehn, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (2021). The soldier in the palace: The political return of the military in post-authoritarian Indonesia. Contemporary Politics, 27(4), 412–430.

Booth, B., Kestnbaum, M., & Segal, D. R. (2001). Are post-Cold War militaries postmodern? Armed Forces & Society, 27(3), 319–342.

Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241–258). Greenwood Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Croissant, A., Kuehn, D., Chambers, P., & Wolf, S. (2018). Beyond the fallacy of coup-ism: Conceptualizing civilian control of the military. Democratization, 25(2), 193–212.

Diamond, L. (2019). Ill winds: Saving democracy from Russian rage, Chinese ambition, and American complacency. Penguin Press.

Farrell, T., Osinga, F., & Russell, J. (Eds.). (2018). Military adaptation in complex environments. Stanford University Press.

Feaver, P. D. (1999). Civil-military relations. Annual Review of Political Science, 2(1), 211–241.

Finer, S. E. (2002). The man on horseback: The role of the military in politics. Routledge.

Haripin, M. (2020). The politics of military reform in Indonesia. ISEAS Publishing.

Hasan, N. (2022). Military networks and democratic consolidation in Indonesia. Asian Politics & Policy, 14(3), 345–362.

Huntington, S. P. (1957). The soldier and the state: The theory and politics of civil-military relations. Harvard University Press.

Janowitz, M. (1960). The professional soldier: A social and political portrait. Free Press.

Keppy, P. (2024). The making and taming of the veteran in Indonesia. War & Society, 42(1), 45–63.

Kuehn, D. (2020). Institutionalizing civilian control of the military in new democracies. Democratization, 27(6), 1012–1031.

Mietzner, M. (2020). The return of the military in Indonesian politics. Journal of Contemporary Asia, 50(2), 223–243.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Ministry of Defense Republic of Indonesia. (2020). Indonesian defense white paper. Ministry of Defense.

Perlmutter, A. (2018). The military and politics in modern times. Yale University Press.

Priamarizki, A., & Haripin, M. (2026). Civil-military relations and democratic resilience in Indonesia. Asian Survey, 66(1), 88–112.

Rasyid, A., & Nugroho, H. (2023). Peran veteran dalam pembinaan kesadaran bela negara. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 13(2), 115–128.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 182.

Schiff, R. L. (2009). The military and domestic politics: A concordance theory of civil-military relations. Routledge.

Widodo, P., & Simatupang, J. (2023). Rekonseptualisasi pertahanan nirmiliter Indonesia. Jurnal Ilmu Pertahanan, 11(1), 50–67.